

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

*Fransiskus Dempo Renwarin<sup>(1)</sup>, Maxion Sumtaky<sup>(2)</sup>*

<sup>1</sup>Universitas Merdeka Malang, Universitas Merdeka Malang

[frans.d.renwarin@gmail.com](mailto:frans.d.renwarin@gmail.com)

[maxionsumtaky@gmail.com](mailto:maxionsumtaky@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of Human Resources Capacity, Government Control, Utilization of Information Technology, and Regional Financial Supervision on the Timeliness of Financial Statement Presentation at the regency working unit of the Southeast Maluku Regency.. Descriptive analysis occupied to describe the formulation of the first and second problems (Sugiyono, 2010). This study also as a verification , which is used to test the allegations about the relationship between the variables of the problem being studied. Data collection using questionnaires, interviews and documentation. Data analysis instrument used multiple linear regression analysis. The results showed that the capacity of HR, Government Internal Control, and regency financial oversight did not significantly influence the Timeliness of Financial Statement Presentation in the Southeast Maluku Regency SKPD. Meanwhile, the Utilization of Information Technology has a significant effect on the Timeliness of the Presentation of Financial Statements in the SKPD of Southeast Maluku Regency.*

**Keyword:** *human resources, government internal control, receiving information technologies, regional financial surveillance, regional reporting, punctuality.*

### PENDAHULUAN

Reformasi keuangan pemerintah yang dilaksanakan pada awal tahun 2000 berdampak meningkatnya tuntutan masyarakat akan suatu pemerintahan yang transparan kepada publik dalam bentuk pelaporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas.

bersih dan berwibawa. Paradigma baru tersebut mewajibkan setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010, merupakan akuntansi pemerintahan berbasis

akrual yang telah mempunyai landasan hukum, yang berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP berbasis akrual dan harus di laksanakan selambatnya mulai pada tahun 2015 lalu. Hal ini sesuai dengan pasal 32. UU No. 17 tahun 2003 yang menetapkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD di susun dan di sajikan sesuai dengan SAP.

Pemerintah harus berupaya menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menjamin penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan daerah yang handal dan tepat waktu, dalam laporan keuangan yang berbasis akrual. Harus memerlukan persiapan yang matang dan terstruktur dalam melakukan pelaporan keuangan berbasis akrual, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, penerapan SAP berbasis akrual harus di lakukan dengan handal dan tepat waktu.

Ketepatan waktuan (*timeliness*) merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan (PP. No. 71 tahun 2010). Demi terselenggaranya ketepatan waktu penyajian laporan keuangan yang baik, maka harus ada Sumber daya Manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik, dalam penggunaan

sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Mahaputra (2014), menyatakan kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, dan data) dan penggunaan jasa pendukung (*training*) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas (Jogiyanto, 1995:7).

Pengendalian intern akuntansi di rancang dari dua tujuan sistem, yaitu menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian serta keandalan informasi akuntansi. Pengendalian intern akuntansi mempunyai beberapa aspek pembentuk yaitu rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan yang bertujuan untuk mengamankan aktiva dan juga agar dapat dipercayai catatan keuangan.

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian terpenting dalam implementasi keterandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan, hal ini dapat dari pengertian yang mendefinisikan pengawasan keuangan daerah adalah upaya yang sistematis dilakukan untuk menetapkan standar kinerja pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk mengetahui perbandingan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, menetapkan adanya suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan tela di gunakan secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan (Yosa, 2010).

Menurut latar belakang masalah di atas maka peneliti mengambil usulan judul penelitian: "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara".

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Sektor Publik

Menurut Jones dan Pendlebury (2010), Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non bisnis. Dalam pakteknya pemerintahan atau organisasi sektor publik mempunyai tujuan utama bukan memaksimalkan laba, melakukan penjualan barang dan jasa, tetapi

di kategorikan sebagai organisasi non-laba yang memperoleh sumber daya finansial dari sumber lain, selain penjualan barang dan jasa. Organisasi pemerintahan merupakan konsep yang didasari oleh teori keagenan, yakni dalam pelaporan akuntansi sektor publik, pemerintah memiliki kewajiban dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah untuk membuat keputusan, baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun politik.

Pemerintah daerah (disingkat PEMDA) memperoleh pendanaannya dari pajak, retribusi, hibah (*grant*), dan pinjaman yang di kelola dan di kuasai oleh pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance*. Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah pemerintah yang dapat memberikan transparansi informasi atau menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi sehingga dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

*Concept Agency teory*, Mardiasmo (2004), menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak untuk memina pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, dan
- b. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

### Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintahan yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan, tentang kondisi keuangan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup laporan keuangan daerah tersebut didalam pengelolaannya adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 51 UU No. 17 tahun 2003, menunjukkan peran penting akuntansi bagi pemerintah daerah, yaitu setiap pejabat pengelola keuangan daerah (bendahara umum daerah) dan kepala satuan kerja perangkat daerah (selaku pengguna anggaran) harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawabnya. Tanggungjawab tersebut di butuhkan oleh pihak eksternal pemda yang di antaranya DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi, rakyat, dan pemerintah pusat.

Empat prasyarat normatif yang di perlukan agar laporan keuangan daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain:

- a. Relevan
- b. Andal
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat di pahami

Selanjutnya terdapat delapan prinsip akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadi ketentuan yang harus di pahami dan ditaati oleh entitas pelapor yaitu:

- a. Prinsip Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Nilai Realisasi
- d. Prinsip Nilai Substansi Mengungguli Formalitas
- e. Prinsip Periodisitas
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan memenuhi karakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Oleh karena itu proses penyajian laporan keuangan harus dapat memberikan jaminan keterandalan dan ketepatan waktu penyajiannya. Hal ini dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintah.

### Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dapat dikatakan relevan dan andal apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. (PP No. 1 tahun 2010).

Kemampuan informasi laporan keuangan mempengaruhi keputusan pimpinan dalam sebuah instansi dan akan hilang jika disampaikan tidak tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi informasi namun demikian relevansi, menjadi tidak mungkin apabila tidak tepat waktu. Oleh sebab itu, ketidak tepat waktu adalah suatu bahasan penting pada publikasi laporan keuangan. Ketepatan waktu menyampaikan laporan keuangan dalam mengungkapkan kondisi suatu perusahaan mungkin mempunyai dampak prediksi dan keputusan pengguna informasi (Leventis dan Weetman, 2004).

Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut *Statemen of Financial Accounting Concept* (SAFC) No. 2 mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kepastiannya untuk mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian harus dilakukan secepat mungkin agar dapat menjamin tersedianya informasi bagi pengguna informasi tersebut.

### **Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Laporan Keuangan dapat dikatakan relevan dan andal

apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. (PP No. 1 tahun 2010).

Kemampuan informasi laporan keuangan mempengaruhi keputusan pimpinan dalam sebuah instansi dan akan hilang jika disampaikan tidak tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi informasi namun demikian relevansi, menjadi tidak mungkin apabila tidak tepat waktu. Oleh sebab itu, ketidak tepat waktu adalah suatu bahasan penting pada publikasi laporan keuangan. Ketepatan waktu menyampaikan laporan keuangan dalam mengungkapkan kondisi suatu perusahaan mungkin mempunyai dampak prediksi dan keputusan pengguna informasi (Leventis dan Weetman, 2004).

Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut *Statemen of Financial Accounting Concept* (SAFC) No. 2 mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kepastiannya untuk mempengaruhi keputusan. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian harus dilakukan secepat mungkin agar dapat menjamin tersedianya informasi bagi pengguna informasi tersebut.

### **Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Sistem pengendalian akuntansi dalam pemerintahan tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan hal ini di atur dalam PP No. 60 tahun 2008 Pasal 1 (1).

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mulai dari pengendalian internal dan audit akuntansi yang merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Proses kegiatan pengendalian internal akuntansi tersebut tidak akan mudah dilaksanakan pada lingkup pemerintahan atau birokrasi tanpa semua dukungan aparatur pemerintah daerah, untuk itu perlu keyakinan yang memadai dalam penerapan sistem pengendalian akuntansi dalam entitas publik agar terhindar dari salah saji material dan pelaporan keuangan yang menyesatkan sehingga kegiatan

pengendalian dilaksanakan sesuai dengan PP. No. 60 tahun 2008 sebagai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pengendalian internal akuntansi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pemanfaatan Informasi**

Teknologi informasi pada umumnya meliputi komputer, perangkat lunak, database, jaringan (internet, intranet), dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2000). Teknologi komputer bukan hanya sebagai sarana pemrosesan dan penyimpanan informasi, namun dapat digunakan sebagai sarana penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen teknologi informasi dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia, dan bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia.

Perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

### **Teknologi**

## Pengawasan Keuangan Daerah

Primayana (2014), pengawasan merupakan usaha yang sistematis untuk menetapkan standar kerja, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan, untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, untuk memperbaiki, dan menjamin sumber daya pemerintahan digunakan secara efektif dan efisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan keuangan daerah harus didukung oleh lembaga legislatif, dimana para pimpinan pemerintah daerah (DPRD) mempunyai fungsi salah satunya yaitu pengawasan keuangan daerah, sehingga masyarakat dan pengguna laporan keuangan lainya mendapat keyakinan yang memadai terhadap efektifitas dan efisiensi pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

Namun dalam prakteknya masih ada beberapa halangan yang dapat menghambat, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan, diantaranya adalah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan

mengenai anggaran dan rendahnya kualitas SDM. Sedangkan faktor eksternalnya adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

## METODELOGI PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian survei yang merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap beberapa anggota sampel dari suatu populasi tertentu yang datanya dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner (Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan rumusan masalah ke satu dan ke dua (Sugiyono, 2010), serta penelitian ini juga bersifat verifikatif, yaitu metode yang digunakan untuk menguji adanya dugaan mengenai adanya hubungan antar variabel dari masalah yang sedang diteliti.

Variabel penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kapasitas SDM
- b. Pengendalian Intern Pemerintah
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi
- d. Pengawasan Keuangan Daerah
- e. Standar Akuntansi Pemerintah
- f. Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Pengelompokan Variabel diatas, dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

**Variabel Dependen.** Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

**Variable Independen** Variable independen dalam penelitian ini adalah Kapasitas SDM, Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Populasi Dan Teknik Penarikan Sampel**

populasi dan sampel dari peneliti ini adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yang berjumlah 30 orang. penelitian dilakukan secara sensus jenuh, dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Dalam penelitian ini

**Regresi Linear Berganda**

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan :

- Y = Ketepatan Waktu
- X1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia
- X2 = Pengendalian Intern Akuntansi
- X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- X4 = Pengawasan Keuangan Daerah
- $\beta_1 \dots \beta_6$  = intercept/koefisien regresi
- $\epsilon$  = Error
- $\alpha$  = Kostanta

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Pengujian Asumsi Klasik**

**a. Hasil Uji multikolinearitas**

sampel yang ditetapkan adalah 1 orang responden dari masing-masing setiap SKPD Pemerintah Maluku Tenggara, yaitu staf bagian akuntansi yang bertugas secara langsung dalam menyusun laporan keuangan.

**Teknik Analisis Data**

**Pengujian Asumsi Klasik**

Pengujian Asumsi Klasik dilakukan guna memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Masalah Multikolinearitas di uji dengan melihat *tolerance value* (kurang dari 0,1) atau nilai VIF lebih dari 10. Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Dan uji Normalitas menggunakan uji *Kolmogoro Smirnov*, dan gambar *Normal Probability Plots*.

Tabel 1.

**Hasil Uji Multikolinearitas**



Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.850	1.177
.836	1.196
.968	1.033
.948	1.054

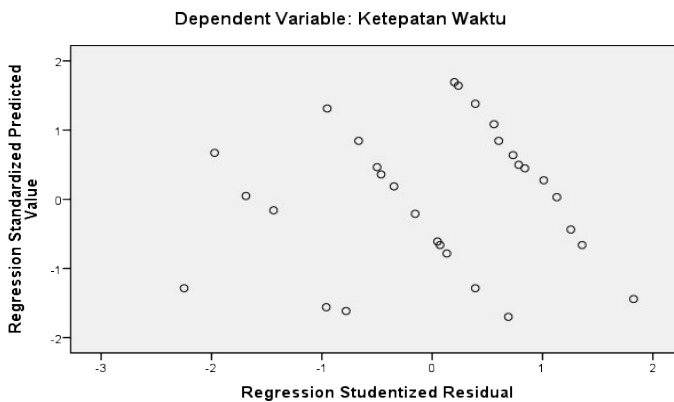
Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi linear berganda yang

dibuat karena nilai VIF yang ada mempunyai nilai di atas angka 1 sehingga tidak melebihi batas VIF yaitu 1

**b. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Gambar 1. Grafik plot Heteroskedastisitas**  
Scatterplot



Sumber : Data primer diolah, 2019

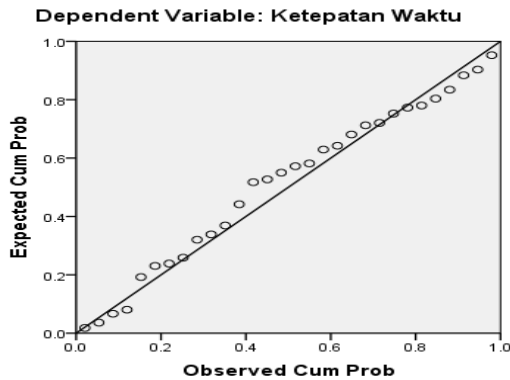
Berdasarkan Gambar 1, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas

maupun di bawah angka 0 pada sumbu y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

**b. Hasil Uji Normalitas**

**Gambar 2. Normal Probability Plots**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber : Data primer diolah, 2019

Gambar 2. menunjukkan bahwa data (titik) menyebar di sekitar dan mendekati garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa data penelitian yang mencakup variabel Kapasitas

SDM, Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berdistribusi normal.

**Tabel 2.**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		30
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.75408786
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.119
	<i>Positive</i>	.068
	<i>Negative</i>	-.119
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		.650
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.791

Sumber : Data primer diolah, 2019

**c. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Tabel 3.

Hasil Uji regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.626	10.956		2.065	.049
Kapasitas SDM	.241	.198	.235	1.217	.235
Pengendalian Intern Akuntansi	.260	.197	.257	1.320	.199
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.196	.095	.369	2.039	.048
Pengawasan Keuangan Daerah	.060	.155	.071	.387	.702

Sumber : Data primer diolah, 2019

$$Y = 22,626 + 0,241 X_1 + 0,260 X_2 + 0,196 X_3 + 0,060 X_4$$

Keterangan :

Y = Ketepatan Waktu

X<sub>1</sub> = Kapasitas SDM

X<sub>2</sub> = Pengendalian Intern Pemerintah

X<sub>3</sub> = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X<sub>4</sub> = Pengawasan Keuangan Daerah

b) Hasil Uji f (f-test)

Tabel 4.

Hasil uji f

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.309	4	1.077	1.633	.000 <sup>a</sup>
Residual	16.491	25	.660		
Total	20.800	29			

Sumber : Data primer diolah, 2019

Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan SPSS, hasil perhitungan uji F menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 <

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang dirumuskan dinyatakan valid sehingga layak dilakukan analisis lebih lanjut.

c) Hasil Uji t (*t-test*)

Tabel 5.

Hasil uji t

Variabel	Koefisien Regresi	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.	Keterangan
Kapasitas SDM (X1)	0,235	1,217	1,697	0,235	Tidak Signifikan
Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0,257	1,320	1,697	0,199	Tidak Signifikan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,369	2,039	1,697	0,048	Signifikan
Pengawasan Keuangan Daerah (X4)	0,071	0,387	1,697	0,702	Tidak Signifikan

Sumber : Data primer diolah, 2019

Hasil Analisis dapat diketahui bahwa variabel Kapasitas SDM memiliki nilai signifikansi  $0,235 > \alpha 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 1,217 < t_{tabel} 1,697$ . Hal ini menunjukkan bahwa Kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini ditolak atau  $H_0$  diterima.

Variabel Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai signifikansi  $0,199 > \alpha 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 1,320 < t_{tabel} 1,697$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara. Dengan demikian hipotesis ke dua penelitian ini ditolak atau  $H_0$  diterima.

Dapat diketahui bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai signifikansi  $0,048 < \alpha 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 2,039 > t_{tabel} 1,697$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian hipotesis ke tiga penelitian ini diterima atau  $H_0$  ditolak.

Diketahui bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah memiliki nilai signifikansi  $0,702 > \alpha 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} 0,387 < t_{tabel} 1,697$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan

demikian hipotesis ke empat penelitian ini ditolak atau  $H_0$  diterima

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil pengujian hipotesis yang digunakan, Variabel Kapasitas SDM, Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dan hanyalah Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan pada SKPD pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, terlebih khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menjamin penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan daerah yang handal dan tepat waktu.

### Saran

a. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat memperluas sampel penelitian, bukan hanya pada SKPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetapi pada SKPD pemerintah lainnya.

b. Bagi peneliti selanjutnya, semua instrumen-instrumen dalam kuesioner harus di uji dengan valid.

## REFERENSI

Ayu Darmayani. 2014. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Terhadap Nilai Laporan Keuangan*.

Chandrarini, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Gerry Armando. 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)*.

Imelda. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury. 1996. *Public Sector Accounting*. Fifth Edition. London: Pitman.

- Liza Rahayu. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standart Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Muliskha Diawati. 2015. *Faktor yang mempengaruhi Keterandalan Laporan Keuangan Daerah: Suatu sarana Good Governance Akuntansi Pemerintah.* -----, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.* -----, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mukhlisul Muzahid. 2013. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Aceh Utara.* -----, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
- Ni Made Sudiaranti. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- Sinta Permata Sari. 2014. *Jurnal Teori Akuntansi: Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan ditinjau dari beberapa aspek. Research Methods and Organizational Studies*

